

## **POLICY BRIEF 02:**

# **PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT UNTUK MEMPERKUAT SOLIDARITAS SOSIAL**

**Ikatan Psikologi Sosial HIMPSI**

**10 April 2020**



Sejak pertama kali diumumkannya kasus pertama di Wuhan Tiongkok pada akhir Desember lalu hingga saat ini wabah COVID-19 sudah menyebar di 213 Negara<sup>1</sup>. WHO sendiri sejak 11 Maret lalu telah mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi atau level tertinggi dari penyebaran penyakit. Ini menimbulkan tantangan global yang belum pernah kita hadapi sebelumnya dengan penyebaran sangat cepat dan mengenai nyaris semua negara di dunia.

Berbagai langkah sudah diambil masing-masing negara mulai dari upaya menghambat penyebaran melalui isolasi wilayah, pembatasan akses transportasi umum, larangan melakukan aktivitas di tempat umum, membatasi jarak fisik dan masih banyak lagi lainnya. Masing-masing negara mengambil langkah sesuai dengan pertimbangan dan konteksnya masing-masing.

## **Pesan Kunci**

**Kebijakan Semakin Ketat,  
Kepatuhan Belum Tentu**

**3 Langkah Penguatan dan  
Pelembagaan Partisipasi  
Masyarakat dalam  
Penanganan Covid-19 di  
Indonesia**

**5 Langkah Aktivasi Pos  
Komunitas**

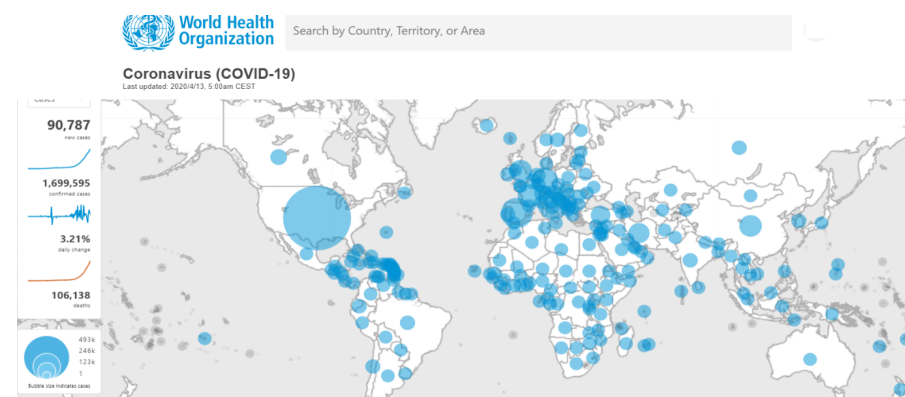
**Tim Penyusun:**

**1. Wahyu Cahyono**

**2. Mirra Noor Milla**

**3. Maki Zaenudin Subarkah**

**4. Whinda Yustisia**



<sup>1</sup> <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

<sup>2</sup> <https://www.covid19.go.id/>

## Kebijakan Semakin Ketat, Kepatuhan Belum Tentu

Dari studi *The Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT)* tentang bagaimana kebijakan dan langkah-langkah yang diambil berbagai negara dalam merespon pandemi COVID-19<sup>3</sup>, ditunjukkan bahwa **secara umum terjadi peningkatan stringency index tiap negara. Ini artinya kebijakan yang diterapkan semakin meningkat atau ketat dari waktu ke waktu.** Tren peningkatan ini terbentuk seiring bertambahnya kasus positif dan jumlah orang yang meninggal.

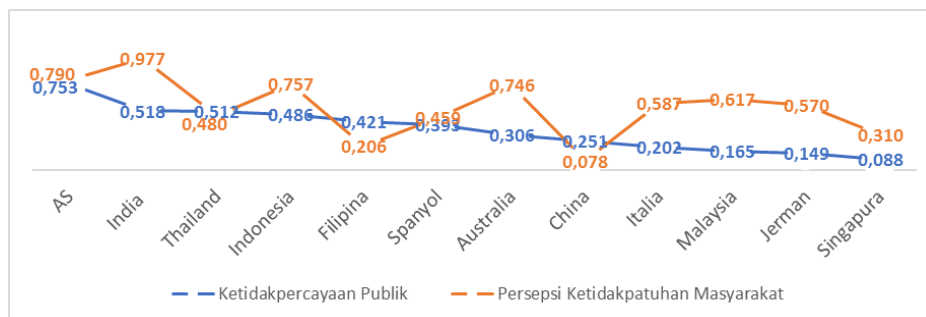
Meskipun demikian berdasarkan hasil dari riset kolaborasi dari 12 Institusi antara lain dari Universitas Harvard, Cambridge, IESE, dan Warwick terkait sikap dan persepsi masyarakat tentang penanganan COVID-19 di lebih dari 100 negara di dunia, ditunjukkan bahwa **trust atau kepercayaan publik tidak selalu linear dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait pencegahan COVID-19.**

Berdasarkan hasil riset tersebut dapat diamati kondisi di Indonesia digambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah sedang dan persepsi kepatuhan terkait Covid-19 rendah. Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan **pengetatan kebijakan tidak serta merta membuat masyarakat menjadi patuh.** Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Diperlukan kanal dan intrusmen alternatif untuk meningkatkan kepatuhan dan kerjasama masyarakat dalam penanganan Covid-19.

**Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah melalui aktivasi modal sosial yang kita miliki, yaitu partisipasi masyarakat melalui inovasi maupun solidaritas sosial.**

Mengacu pada data dari *Open Government Partnership*, inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sudah diterapkan di berbagai negara. Beberapa juga sudah diterapkan di Indonesia, namun terdapat beberapa kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk diadopsi. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikategorikan menjadi kebijakan untuk mendorong inovasi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, dan kebijakan untuk meningkatkan solidaritas sosial.

Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini didasarkan dari laporan *World Giving Index 2018*, dimana Indonesia berada di peringkat teratas sebagai bangsa yang paling dermawan. Ada tiga aspek kebaikan yang diukur dalam laporan tersebut, yaitu membantu orang yang tidak dikenal, memberi sumbangan, dan menjadi relawan. Hal ini tercermin dari munculnya aneka gerakan untuk membantu sesama baik itu berupa donasi uang, tenaga (relawan), barang (masker, sembako, makanan dll) maupun inovasi (membuat bilik disinfektan, jahit masker dll) di berbagai daerah. Ini merupakan bukti bahwa pelibatan masyarakat dalam perang melawan Covid-19 merupakan potensi yang perlu segera dikoordinir dan disebarakan agar solidaritas dapat menular ke semua daerah di Indonesia dan bantuan dapat terdistribusi secara merata.

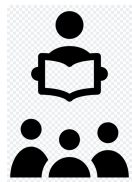


<sup>3</sup> <https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/oxford-covid-19-government-response-tracker>

# Langkah Penguatan dan Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia

Penetapan kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, ternyata tidak serta merta membuat masyarakat melakukan tindakan pencegahan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Di lain pihak, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi terus bermunculan di berbagai daerah. **Untuk itu partisipasi aktif dari masyarakat perlu terus dikuatkan dan dilembagakan dalam sebuah struktur yang terkoordinasi.** Selama ini Partisipasi yang ada baru sebatas inisiatif-inisiatif dan ini belum membentuk struktur jejaring yang saling terhubung. Terbentuknya struktur jejaring menjadi penting karena ini menandakan bahwa inisiatif dari masyarakat terhubung dengan sumber dukungan dan ekosistem yang lebih besar termasuk dalam hal ini jajaran Gugus Tugas COVID-19.

Tiga langkah utama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:



**Menguatkan narasi solidaritas sosial, gotong royong dan empati.** Narasi tersebut harus disampaikan secara terus menerus oleh berbagai pihak, bukan hanya oleh pemerintah namun juga dikomunikasikan oleh semua lapisan di masyarakat. Diantaranya melalui menyebarkan praktek-praktek baik yang ada di masyarakat dalam membantu penanganan Covid-19. Seperti inisiatif dan inovasi yang dilakukan di Desa Panggungharjo, Bantul dengan konsep mengembangkan ketahanan komunitas<sup>4</sup>. Inisiatif serupa juga muncul di Cimahi<sup>5</sup> dan Buleleng<sup>6</sup>.

Pemerintah dapat mendorong para akademisi, ahli, ilmuwan serta masyarakat lainnya untuk berkontribusi dalam menciptakan inovasi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya selama pandemi.



**Membangun ruang dan menyediakan mekanisme untuk mengelola partisipasi masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah.** Partisipasi aktif

masyarakat idealnya tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan regulasi pemerintah. Misalnya membuka rekrutmen relawan untuk berbagai peran selain tenaga kesehatan, mengorganisasikan relawan untuk memberikan dukungan sosial dan emosional kepada kelompok beresiko. Misalnya, melembagakan para relawan dari kalangan warga yang bersedia menjaga ODP dan PDP serta kelompok beresiko lainnya.



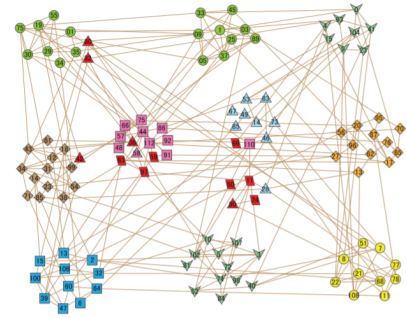
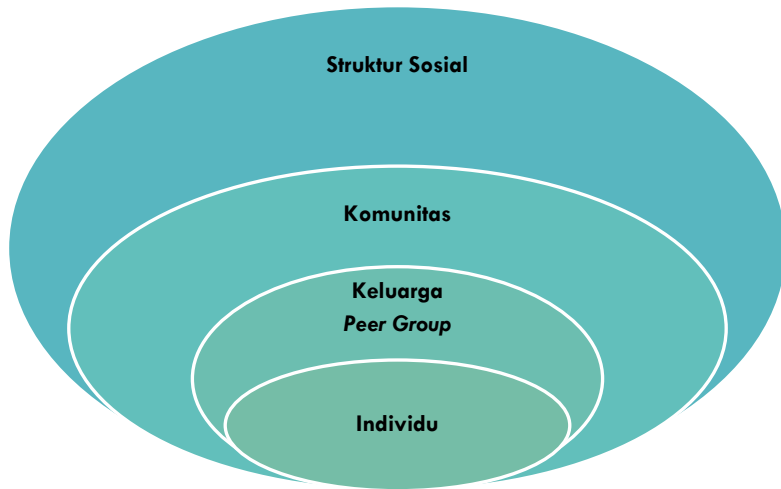
**Membangun jejaring struktur di tingkat komunitas.** Kita telah memiliki

pengalaman terkait penanganan bencana dalam berbagai tahapan dan bermacam konteks. Salah satu praktek baik yang dicatat adalah daerah dengan komunitas yang memiliki partisipasi aktif cenderung lebih memiliki resiliensi (ketangguhan) dan relatif lebih cepat pulih. Pada situasi tersebut komunitas di level terbawah (RT/RW/dukuh/dusun/kampung) bertransformasi fungsinya menjadi pos koordinasi warga. Penguatan jejaring struktur ini menjadi poin kunci untuk menguatkan Program Desa Siaga COVID-19 yang sudah ada.

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita/d-4965710/soal-protokol-penanganan-corona-kemendes-contohkan-desa-panggungharjo>

<sup>5</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/04/09/11511811/kompaknya-warga-di-cimahi-mengurus-tetangga-yang-positif-corona>

<sup>6</sup> <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/04/11/188298/penuhi-kebutuhan-warga-dusun-di-buleleng-buka-keranjang-solidaritas>



Gambar struktur lapisan sosial dan jaringan struktur yang sudah teraktivasi. Pesan pencegahan COVID-19 terkoneksi mulai dari tingkat individu, keluarga, komunitas dan struktur-sosial. Aktivasi pos komunitas dapat memperkuat saling bantu diantara warga sekaligus menjadi hub atau penghubung dengan sumber dukungan yang lain termasuk juga dengan gugus tugas.

### Lima Langkah Aktivasi Pos Komunitas

